

## **PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO.19 TAHUN 2005 TENTANG PELAYANAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH DASAR DI DESA KERTA BUMI KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER**

**Maria Fransiska Mali**

### ***Abstrak***

*Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si dan Ibu Dra. Hj. Ida Wahyuni, Msi Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang pelayanan standar sarana dan prasarana pendidikan tingkat sekolah dasar di desa kerta bumi kecamatan kuaro kabupaten paser apakah telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peraturan pemerintah tentang pelayanan standar sarana dan prasarana pendidikan. Jenis Penelitian yaitu penelitian kualitatif, dengan Teknik Pengumpulan yaitu library research dan field work research (observasi, wawancara langsung dengan responden, arsip-arsip dan dokumen) yang ada di SDN 024 dan SDN 025 Kuaro. Sumber Data yang diperoleh dengan menggunakan snowball sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang meliputi proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.*

*Dari hasil penelitian ini maka diketahui bahwa pada SDN 024 memiliki sarana perabot yang cukup untuk memenuhi standar sedangkan untuk SDN 025 pun sama bahwa memiliki sarana perabot yang cukup memenuhi standar, kemudian untuk bangunan sekolah SDN 024 memiliki bangunan yang lebih sesuai dengan standarisasi sekolah dibandingkan dengan SDN 025. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan standar sarana dan prasarana pendidikan ialah adanya partisipasi pemerintah, kemudian adanya kerjasama yang baik dari Dinas terkait dan transparansi kepada wali murid. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelayanan standar sarana dan prasarana pendidikan adalah keterlambatan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dan kurangnya komunikasi antara sekolah dan komite sekolah dan juga wali murid yang kurang mampu sehingga membuat tingkat kepuasan orang tua murid menjadi rendah.*

**Kata Kunci :** *Pelayanan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : nita\_djail@yahoo.co.id

## **Pendahuluan**

Pemerintah merupakan pencerminan kehendak untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah diperlukan upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki pemikiran intelektual yang tinggi sehingga dapat memahami tentang hakikat dari tujuan pembangunan sehingga dapat terlaksana secara optimal. Peningkatan sumber daya manusia dalam suatu Negara dapat dilakukan salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan.

Pentingnya peranan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia didalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada Alenia 4 yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk memenuhi amanat konstitusional tersebut, pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dalam rangka memenuhi hak dasar setiap warga Negara untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Seiring dengan meningkatnya perkembangan ilmu teknologi, maka dibidang pemerintahan sekarang terjadi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan tersebut ialah dengan mewujudkan aturan tata pemerintahan yang baik (good governance) yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip demokrasi, efektif dan efesien. Selain itu pemerintah yang dicita-citakan adalah juga mengandung prinsip mengikut sertakan masyarakat (partisipasi), terbuka (transparansi), dan kesetaraan dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu unsur dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang perlu menjadi perhatian adalah pelayanan dibidang pendidikan dimana dalam penyelenggarannya itu tentu dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang, sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 ayat (1) yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, sosial, emosional, dan kualitas peserta pendidik.

Namun kondisi dilapangan yang terlihat pada tingkat sekolah dasar ditemukan dari pengamatan sementara penulis berupa gejala-gejala yang menunjukkan bahwa pelayanan standar sarana dan prasarana pendidikan tingkat sekolah dasar disekolah yang akan peneliti teliti masih belum optimal dikarenakan Standar sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti belum tersedianya peralatan praktik untuk membantu kelancaran belajar mengajar, belum tersedianya perpustakaan sehingga, meminimalkan sumber-sumber ilmu/bacaan siswa dalam mendalami mata pelajaran, belum tersedianya sarana tempat ibadah yang dapat digunakan murid/siswa untuk menjalankan ibadahnya, serta minimnya literatur bacaan/buku pelajaran yang menunjang dalam pelaksanaan belajar mengajar.

Selain itu tingkat kepuasan orang tua murid dengan alasan tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan sekolah agar menunjang prestasi belajar siswa, kemudian ditambah pula dengan keadaan ekonomi orang tua murid yang sebagian besar adalah keluarga kurang mampu sehingga dalam pemenuhan kebutuhan peralatan sekolah masih bergantung pada kebijakan sekolah. Sehingga dari gejala-gejala tersebut dapat menimbulkan terhambatnya optimalisasi dari implementasi pelayanan standar sarana dan prasarana pendidikan tingkat sekolah dasar yang ada di Kabupaten Paser.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat masalah-masalah yang ada maka dengan ini penulis mencoba melakukan suatu penelitian dengan judul : “ Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Pelayanan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Di Desa Kerta Bumi Kec. Kuaro Kab. Paser (Studi Di Sekolah Dasar Negeri 024 dan Sekolah Dasar 025)”

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Kebijakan Publik***

Kebijakan merupakan serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan tersebut dalam rangka mencapai suatu tujuan. freidrich (dalam lubis 2007:7)

Menurut Raksasatya dalam Lubis (2007:7) kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan

### ***Implementasi Kebijakan***

Seperti yang diketahui bahwa implementasi merupakan suatu penerapan dari kebijakan yang telah diambil dan disepakati sebelumnya. implementasi kebijakan menurut Lester dan Stewart (2000:102) dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Salusu (2005:409) mengemukakan bahwa implementasi ialah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu.

### ***Pelayanan Publik***

Dalam tata bahasa, istilah pelayanan diambil dari kata Inggris “*service*” yang berasal dari kata *to serve* yang berarti melayani. Dalam sektor publik, *service* berarti melayani suatu jasa yang diperlukan oleh masyarakat dalam arti

berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya.

Kurniawan (2005:5) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

### ***Pelayanan Standar Sarana dan Prasarana***

sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan disekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan pendidikan disekolah. Pada dasarnya prasarana sekolah dasar lebih merupakan ruang-ruang. Yang dimaksud dengan ruang disini adalah bukan hanya ruang tempat kegiatan proses belajar mengajar saja, melainkan dengan semua fasilitas, ruang termasuk lapangan atau kebun yang menunjang kegiatan pendidikan. Bafadal (2003:2)

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang dimana didalamnya dijelaskan bahwa salah satu persyaratan pendidikan sekolah diharuskan memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, kemudian dalam tata aturannya Menurut Depertemen pendidikan Nasional Standarisasi sarana merupakan pedoman dalam memuat ketentuan-ketentuan perabot sekolah dasar yang berupa jenis, ukuran, jumlah kebutuhan perabot sekolah dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan siswa.

### ***Pendidikan***

Secara etimologi pendidikan (*paedagogie*) berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata (*PAIS*), artinya anak, dan (*AGAIN*) diterjemahkan membimbing, jadi (*paedagogie*) yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak. Menurut Hooggeveld (dalam Ahmadi dan Uhbianti 2001:69) Mendidik adalah membantu anak supaya ia cukup cakap menyelenggarakan tugas hidupnya atas tanggung jawabnya sendiri.

Menurut Hasbullah (2005:1) bahwa dalam arti sederhana pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dimasyarakat dan kebudayaan.

### ***Sekolah Dasar***

Menurut Bafadal (2003:3) menyebutkan sekolah dasar merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan enam tahun. Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 1990 (dalam Bafadal 2003:3) tentang pendidikan dasar disebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan Sembilan tahun, terdiri atas program pendidikan enam

tahun di sekolah dasar dan program pendidikan tiga tahun disekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).

Dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 pasal 17 ayat (1) bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS), atau bentuk lain yang sederajat.

### ***Definisi Konsepsional***

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini maka definisi konsepsional dari penelitian ini adalah “Pelaksanaan peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 tentang pelayanan standar sarana dan prasarana pendidikan Tingkat Sekolah Dasar merupakan pelaksanaan yang disusun secara sistematis berangkat dari tahap pendefinisian masalah hingga evaluasi dampak kebijakan, sehingga merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam suatu kebijakan didalam memecahkan persoalan dalam memberikan pelayanan pendidikan, terutama untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan tingkat sekolah dasar agar membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan atau dapat menciptakan situasi pengajaran yang kondusif, serta dapat menghasilkan generasi yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi.”.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu. (Widodo dan Mukhtar dalam Suwardi 2002:56)

Lokasi dalam Penelitian ini dilaksanakan di SDN 024 dan SDN 025

### ***Fokus Penelitian***

Adapun fokus dari penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang pelayanan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar meliputi pelayanan secara teknis :
  - 1). Rehabilitasi Prasarana sekolah yang terdiri dari :
    - a). Ruang perpustakaan
    - b). Tempat ibadah
    - c). Ruang serbaguna
  - 2). Bantuan sarana pendidikan, berupa perabot pendidikan.
  - 3). Pelayanan Bantuan Pendidikan
2. Faktor yang mendukung dan menghambat pelayanan sarana dan prasarana pendidikan tingkat sekolah dasar.

### ***Sumber Data***

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan teknik *Snowball Sampling*, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010:97) berpendapat bahwa *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Adapun yang menjadi key-informan adalah Kepala Sekolah, sedangkan yang menjadi informan ialah Guru-guru pengajar, Staf Tata Usaha, dan Orang tua/Wali siswa.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai saran dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitiannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini sebagai referensi.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :
  - a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian.
  - b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden atau pihak lain yang berwenang guna melengkapi data.
  - c. Penelitian dokumen, yaitu dengan menggunakan data-data atau dokumen pada objek penelitian yang mendukung penelitian ini.

### ***Analisis Data***

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif menurut Mathew B Miles dan Michel Huberman (2007:15-20), menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri atas empat komponen, yaitu terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN**

### ***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

#### ***Sekolah Dasar Negeri 024***

SD Negeri 024 merupakan salah satu sekolah dasar Negeri yang berada

di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaru Kabupaten Paser. Berdiri sejak tahun 1989 dengan luas lahan 8.784 m<sup>2</sup> dan luas bangunan ± 495 m<sup>2</sup> dengan status tanah dan juga bangunan milik Pemerintah/ sendiri. Sebagai kondisi awal bagi seluruh jenjang pendidikan, maka SD Negeri 024 bertugas untuk memberikan pengenalan ilmu pengetahuan, kecakapan, perilaku, budi pekerti dan keagamaan. Agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang baik maka SD Negeri 024 dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas pendidikan Kota

### ***Sekolah Dasar Negeri 025***

Sekolah Dasar Negeri 025 terletak di pemukiman penduduk dilokasi Transmigrasi perkebunan inti rakyat yaitu kelapa sawit, di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaru, Kabupaten Paser. Sekolah Dasar Negeri 025 Kuaru berada disatu daerah yang mana masyarakatnya heterogen dari daerah asalnya, baik suku maupun agamanya yang membaaur dengan masyarakat setempat suku paser yang berada di Kecamatan Kuaru. Sekolah ini berdiri pada tahun 1989 dengan status sekolah Negeri. Seperti sekolah-sekolah dasar pada umumnya dimana SD Negeri 025 di pimpin oleh seorang kepala sekolah yang bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah agar dapat mencetak generasi penerus yang berkualitas.

### ***Visi dan Misi Sekolah Dasar Negeri 024***

Fungsi visi, pertama adalah sebagai sumber informasi inspirasi, kedua sebagai acuan bagi para pembuat keputusan dan ketiga adalah memungkinkan semua orang disekolah menemukan nilai-nilai umum untuk memusatkan energi mencapai kemajuan yang diinginkan. Adapun visi Sekolah Dasar Negeri 024 adalah :

“ Menyiapkan siswa mempunyai kemampuan dasar yang memadai, berwawasan lingkungan, berdisiplin, berdasarkan keimanan dan ketakwaan ” .

Adapun misi dari SD Negeri 024 adalah :

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif.
2. Menumbuhkembangkan persaingan sehat dalam belajar agar mampu berprestasi.

### ***Visi dan Misi Sekolah Dasar Negeri 025***

Adapun visi SD Negeri 025 adalah :

“ Pengembangan keterampilan dasar, pengetahuan, pemahaman, nilai dan sikap peserta didik yang bermuara pada peneingkatan sumber daya manusia”.

Mengacu pada visi Sekolah di atas, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan layanan pendidikan yang mengarah pada kemampuan, sikap dan keterampilan peserta didik sesuai dengan potensi sekolah.
2. Meningkatkan potensi kecerdasan, keterampilan dan kemampuan berfikir segenap tenaga pendidik.

***Rehabilitasi Prasarana SD Negeri 024 dan SD Negeri 025 yang terdiri dari Ruang Perpustakaan, Tempat Ibadah dan Ruang serbaguna***

Ruang perpustakaan merupakan tempat kegiatan baik guru maupun siswa mencari informasi dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat pustakawan mengelolah perpustakaan. Kemudian tempat ibadah merupakan salah tempat dimana guru dan siswa/siswi menjalankan ibadahnya, serta ruang serbaguna yang dapat digunakan siswa dan guru untuk berbagai macam kegiatan sekolah.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan bahwa rehabilitasi prasarana sekolah pada SD Negeri 024 belum pernah dilakukan karena SDN 024 belum memiliki bangunan berupa ruang perpustakaan, tempat ibadah, serta ruang serbaguna tetapi dengan inisiatif dari kepala sekolah SD Negeri 024 tersebut maka tidak berpengaruh pada proses belajar mengajar, karena masih bisa menggunakan bangunan yang ada yaitu rumah dinas kepala sekolah yang tidak ditempati oleh kepala sekolah tersebut untuk dijadikan sebagai ruang perpustakaan dan tempat ibadah. Hal ini diperjelas pada wawancara kepada kepala sekolah SD Negeri 024 bapak Sukamto, S. Pd :

“ Memang pada dasarnya sekolah kami baru akan menuju kearah penyesuaian standarisasi sekolah, sebagaimana yang tercantum dalam buku standarisasi sekolah dasar dari diknas, namun pada proses yang berjalan ini kami bisa menggunakan prasarana yang tersedia, dan untuk perpustakaan dan musolla kami menggunakan rumah dinas kepala sekolah untuk sementara sambil menunggu bantuan dari diknas“. (Wawancara 05 Juni 2013)

Kemudian untuk SDN 025 Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan bahwa rehabilitasi prasarana sekolah pada SD Negeri 025 belum pernah dilakukan karena SDN 025 belum memiliki bangunan berupa tempat ibadah, serta ruang serbaguna, dan SDN 025 tersebut hanya memiliki 1 ruang perpustakaan dengan kondisi yang cukup karena ruangnya yang sempit dan belum memiliki kursi serta meja yang dapat digunakan siswa untuk belajar, serta bangunan ruang perpustakaan tersebut belum pernah dilakukan rehabilitasi oleh Diknas.

Hal ini ditegaskan pula oleh kepala sekolah SD Negeri 025 bapak Sarna, S. Pd dalam wawancara sebagai berikut :

“ mungkin dalam bangunan dan kelengkapan lain masih banyak yang belum terpenuhi, namun kami juga berusaha bagaimana agar proses penyelenggaraan tetap berjalan dengan baik, seperti yang mbak lihat, kami masih bisa menggunakan fasilitas yang ada untuk proses kegiatan

belajar mengajar, dan untuk perpustakaan sendiri kami menggunakan perpustakaan yang ada dalam kondisi yang cukup, dan dari dinas pendidikan belum pernah melakukan rehabilitasi prasarana sekolah yang terdiri dari tempat ibadah dan ruang serbaguna karena SDN 025 kami sendiri belum memiliki bangunan tersebut ”.(Wawancara 04 Juni 2013)

### ***Bantuan Sarana Pendidikan berupa Perabot Pendidikan pada SD Negeri 024 dan SD Negeri 025***

Sarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya penelitian, dimana didalamnya termasuk perabot sekolah yang perlu mendapat perhatian karena merupakan salah satu faktor masukan yang mempunyai peran penting dalam proses pembentukan kualitas intelegensi atau kemampuan untuk menyerap ilmu-ilmu yang diberikan, karena pada dasarnya perabot sekolah adalah sarana yang dapat dipindahkan atau dipergunakan secara tidak langsung dalam kegiatan pendidikan, namun akan tetapi sosok penting keberadaannya yang penempatannya berada diruang kelas, ruang administrasi, ruang guru, ruang kepala sekolah dan ruang-ruang penunjang lainnya pada suatu sekolah.

Pada SDN 024 sendiri telah mendapat bantuan perabot pendidikan berupa kelengkapan praktik, berupa alat praktik agama serta alat praktik olahraga. Hal ini diperjelas dalam hasil wawancara dengan kepala sekolah Bapak Sukamto, S.Pd bahwa :

“ Sebenarnya untuk dinas sendiri telah memberikan perhatian yang cukup baik pada sekolah kami, karena sebulan yang lalu kami juga mendapat bantuan alat praktik berupa alat praktik agama dan alat praktik olahraga, kemudian adapula beasiswa yang direalisasikan dalam bentuk barang berupa seragam sekolah dan tas serta bantuan dana BOS (Bos Pusat) dan BOSDA (Bos Daerah) yang digunakan sebagai dana operasional sekolah “. ( Wawancara 04 Juni 2013 )

Kemudian untuk SDN 025 dari hasil penelitian yang peneliti peroleh dilapangan bahwa kelengkapan perabot di SD Negeri 025 masih belum terhitung memenuhi standar yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang pendidikan yang ada dan SDN 025 ini tidak mendapat bantuan berupa perabot pendidikan melainkan bantuan-bantuan lainnya berupa BOS dan BOSDA, namun pada praktek pelaksanaan kegiatan baik dari kegiatan pengajaran maupun pelaksanaan administrasi sekolah dapat berjalan dengan baik.

Hal ini diperjelas oleh keterangan dari kepala sekolah SD Negeri 025 Bapak Sarna, S. Pd bahwa beliau menyatakan sebagai berikut :

“ Kerena sarana bangunan yang kami miliki terbatas, namun kami berusaha memanfaatkan fasilitas perabot yang ada sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan hal ini pun tidak terlalu membawa pengaruh yang mengganggu proses kegiatan belajar mengajar karena kegiatan belajar mengajar kami dapat dilaksanakan dengan baik, dan

untuk melengkapi perabotan itu sendiri masih dalam proses, kemudian untuk sekolah kami ini sendiri selama ini belum mendapat bantuan perabot pendidikan melainkan bantuan BOS dan BOSDA“. (Wawancara 03 Juni 2013)

***Pelayanan Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pada SD Negeri 024 Dan SD Negeri 025 Di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser***

Bantuan-bantuan yang telah diberikan antara lain :

1. BOS (Biaya Operasional Sekolah ) pembelian beberapa keperluan sekolah, namun sebagian besar  
BOS (Biaya Operasional Sekolah) ini dipergunakan untuk kegiatan operasional sekolah, dalam rangka pembelian beberapa keperluan sekolah, namun sebagian besarnya dana BOS tersebut digunakan untuk membayar gaji guru honor sekolah.
2. BOSDA (Biaya Operasional Sekolah dari Daerah)  
BOSDA merupakan salah satu kelanjutan dari BOS, bedanya ialah BOSDA keluar tidak berkala seperti BOS. Dan dana yang didapat dapat dipergunakan untuk membeli perlengkapan yang diperlukan sekolah.
3. Bantuan-bantuan Lain  
Selain BOS dan BOSDA ada beberapa bantuan lain yang diberikan oleh Diknas dan bukan berupa bantuan dana melainkan bantuan peralatan dan perlengkapan diantaranya :
  1. Seperangkat computer
  2. Buku-buku pelajaran dan Buku-buku cerita
  3. Peralatan pratik agama
  4. Peralatan praktik olahraga .

***Faktor Pendukung Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Pelayanan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan***

1. Kepastian Undang-Undang, Jaminan kepastian Undang-Undang yaitu pembukaan 1945 dalam pembukaan alenia ke 4, kemudian UU No. 20 tahun 2003 mengenai sistem Pendidikan Nasional, kemudian adanya peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 mengenai standar pelayanan nasional yang diperkuat dalam keputusan Menteri Pendidikan No. 129/U/2004 mengenai standar pelayanan bidang minimal yang menjamin terselenggaranya pemenuhan penigkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama pada tingkat sekolah dasar.
2. Adanya partisipasi dalam memberikan bantuan untuk sarana dan prasarana pendidikan, Pelaksanaan peraturan pemerintah no.19 tahun 2005 tentang pelayanan standar sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya dilakukan secara berproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana, untuk tiap-tiap gugus yang terdiri dari beberapa sekolah akan menyerahkan laporan perkembangan kondisi sekolah nantinya akan dipertimbangkan dan ditindak

lanjuti lebih jauh. Partisipasi pemerintah ini juga telah dapat dilihat dari beragamnya jenis bantuan yang telah diperkuat dalam hasil wawancara kepada kepala sekolah SD Negeri 024 yang menyatakan bahwa :

“ Pemerintah daerah cukup ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan untuk tiap sekolah dasar selain dari dana BOS, sekolah kami pun telah menerima bantuan beasiswa untuk tiap murid yang berprestasi dan dianggap siswa yang tidak mampu, namun hasil dari beasiswa ini kami realisasikan dalam bentuk peralatan kelengkapan sekolah bagi siswa”. (Wawancara 07 Juni 2013)

3. Setiap anggaran yang bertujuan untuk peningkatan standar sarana dan prasarana pendidikan mendapat perhatian yang baik dari pemerintah.
4. Adanya dukungan orang tua atau wali murid yang terwakilkan oleh pihak komite sekolah seperti pada SD Negeri 025, sehingga mempermudah dalam mengelola kebijakan sekolah yang berkaitan dengan peningkatan mutu standarisasi pendidikan sekolah. Seperti yang dinyatakan oleh bapak kepala sekolah SD Negeri 025 yaitu bapak Sarna, S. Pd dalam wawancara berikut :  
“ Untuk pihak komite sendiri dengan sekolah terjalin kerjasama cukup baik, dari pihak sekolah sendiri telah berusaha transparan dalam menjelaskan tiap kegiatan baik itu yang menyangkut dengan sistem pengajaran maupun dengan dana-dana bantuan yang diterima sekolah”. (Wawancara 10 Juni 2013)

### ***Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Pelayanan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan***

1. Lambatnya bantuan yang diterima seperti administrasi yang berbelit-belit yang dijalankan oleh pemerintah setempat.

Faktor penghambat pelaksanaan peraturan pemerintah no.19 tahun 2005 tentang pelayanan standar sarana dan prasarana pendidikan tingkat sekolah dasar biasanya diawali dengan administrasi yang berbelit-belit yang dijalankan oleh pemerintah setempat, dalam menanggapi perbaikan sarana dan prasarana pendidikan ditingkat sekolah dasar, walaupun pada akhirnya permohonan tersebut ditanggapi, namun sering kali tersendat-sendat akibat administrasi yang terlampau rumit, hal ini diperjelas dalam wawancara peneliti dengan kepala sekolah SD Negeri 024 Bapak Sukamto, S. Pd sebagai berikut :

“ Proposal yang kami ajukan pasti ditanggapi positif, namun dalam realisasinya terlampau lama dengan alasan menunggu dana anggaran tahun pendidikan selanjutnya”. (Wawancara 10 Juni 2013)

Hal inipun senada dengan yang dinyatakan oleh bapak kepala sekolah SD Negeri 025 Bapak Sarna, S. Pd , bahwa :

“ Setiap proposal yang kami ajukan kepada diknas ditanggapi dengan baik namun dalam merealisasikannya sangatlah terkesan lambat, dan terkadang proposal kami hanya sampai pada tingkat gugus sekolah, atau

seringkali terselip jika tidak diberi perhatian khusus". (Wawancara 11 Juni 2013)

2. Rendahnya kepuasan dan kenyamanan dari orang tua murid dalam menyekolahkan anaknya.

Ada faktor ketidaknyamanan orang tua siswa dalam menyekolahkan anaknya pada sekolah yang minim sarana dan prasarana pendidikannya karena bisa mempengaruhi pada minat belajar dan prestasinya disekolah yang bersangkutan tersebut. Ketidakpuasan orang tua murid inilah yang biasanya dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan proses belajar para siswa dalam mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan.

### **Pembahasan**

Sarana dan prasarana dipilih sebagai determinan penting untuk keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan, karena dalam proses belajar mengajar tanpa didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai maka kualitas pendidikan yang dihalikan kurang optimal Menurut Sadu (2001:126) sarana/fasilitas pendidikan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain gedung/bangunan sekolah yang memadai, kondisi ruang belajar mengajar bersih dan sehat, dan kelengkapan/ sarana penunjang lainnya disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan bahwa rehabilitasi prasarana sekolah pada SD Negeri 024 belum pernah dilakukan karena SDN 024 belum memiliki bangunan berupa ruang perpustakaan, tempat ibadah, serta ruang serbaguna, tetapi dengan inisiatif dari kepala sekolah SD Negeri 024 tersebut maka tidak berpengaruh pada proses belajar mengajar, karena masih bisa menggunakan bangunan yang ada yaitu rumah dinas kepala sekolah yang tidak ditempati oleh kepala sekolah tersebut untuk dijadikan sebagai ruang perpustakaan dan tempat ibadah. Hal ini diperjelas pada wawancara kepada kepala sekolah SD Negeri 024 bapak Sukamto, S. Pd bahwa Memang pada dasarnya sekolah kami baru akan menuju kearah penyesuaian standarisasi sekolah, sebagaimana yang tercantum dalam buku standarisasi sekolah dasar dari diknas, namun pada proses yang berjalan ini kami bisa menggunakan prasarana yang tersedia, dan untuk perpustakaan dan musolla kami menggunakan rumah dinas kepala sekolah untuk sementara sambil menunggu bantuan dari diknas.(Wawancara 05 Juni 2013)

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan bahwa rehabilitasi prasarana sekolah pada SD Negeri 025 belum pernah dilakukan karena SDN 025 belum memiliki bangunan berupa tempat ibadah, serta ruang serbaguna, dan SDN 025 tersebut hanya memiliki 1 ruang perpustakaan dengan kondisi yang cukup karena ruangnya yang sempit dan belum memiliki kursi serta meja yang dapat digunakan siswa untuk belajar, serta bangunan ruang perpustakaan tersebut belum pernah dilakukan rehabilitasi oleh Diknas. Hal ini ditegaskan pula oleh kepala sekolah SD Negeri 025 bapak Sarna, S. Pd dalam

wawancara bahwa mungkin dalam bangunan dan kelengkapan lain masih banyak yang belum terpenuhi, namun kami juga berusaha bagaimana agar proses penyelenggaraan tetap berjalan dengan baik, seperti yang mbak lihat, kami masih bisa menggunakan fasilitas yang ada untuk proses kegiatan belajar mengajar, dan untuk perpustakaan sendiri kami menggunakan perpustakaan yang ada dalam kondisi yang cukup, dan dari dinas pendidikan belum pernah melakukan rehabilitasi prasarana sekolah yang terdiri dari tempat ibadah dan ruang serbaguna karena SDN 025 kami sendiri belum memiliki bangunan tersebut. (Wawancara 04 Juni 2013). selain itu SDN 024 telah mendapat bantuan perabot pendidikan berupa kelengkapan praktik, seperti alat pratik olahraga serta alat pratik agama. Hal ini diketahui dalam hasil wawancara kepada kepala sekolah SD Negeri 024 yang menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Paser telah melaksanakan peraturan pemerintah dalam pelayanan sarana dan prasarananya dan memberikan perhatian yang baik dan hal ini terlihat dari adanya bantuan perabot pendidikan berupa buku-buku dan alat pratik, kemudian adapula beasiswa yang direalisasikan dalam bentuk barang berupa tas dan buku serta bantuan BOSDA yang digunakan sebagai dana operasional sekolah.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh dilapangan bahwa kelengkapan perabot pendidikan di SD Negeri 025 masih belum terhitung memenuhi standar yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang pendidikan yang ada dan untuk SDN 025 sendiri tidak mendapatkan bantuan perabot pendidikan, namun pada praktek pelaksanaan kegiatan baik dari kegiatan pengajaran maupun pelaksanaan administrasi sekolah dapat berjalan dengan baik. Dalam tiap pendidikan diperlukan suatu kesinergian antar komponen pendidikan baik dari guru, murid, sistem kurikulum, dan sarana dan prasarana pendidikan terutama sekolah dasar yang langsung dibawah dinas pendidikan kota. Bantuan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan disekolah sangat diperlukan, oleh karena itu ada beberapa bantuan yang diberikan secara berkala maupun telah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Bantuan-bantuan yang telah diberikan antara lain BOS, BOSDA serta bantuan-bantuan lain berupa seperangkat komputer, perlengkapan praktik agama dan praktik olahraga.

## **PENUTUP**

Pada SD Negeri 024 dan SD Negeri 025 pada dasarnya telah melaksanakan peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang pelayanan standar sarana dan prasarana pendidikan tingkat sekolah dasar sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan No. 129/U/2004 mengenai standar pelayanan minimal sekolah, kemudian Di dalam pelaksanaan peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang pelayanan standar sarana dan prasarana pendidikan tingkat sekolah dasar, para aparatur sekolah saling bersinergi untuk memberikan kelancaran yang baik dalam pemenuhan pelayanan pendidikan sekolah mereka

masing-masing meskipun dalam kelengkapan sarana dan prasarana masih terbilang minim dan belum memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan.

Dari penelitian ini juga dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang pelayanan standar sarana dan prasarana pendidikan tingkat sekolah dasar di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, diantaranya yaitu adanya administrasi yang rumit dalam memberikan bantuan kepada sekolah sehingga keterlambatan bantuan yang ada, kemudian pada sekolah yang hanya mengajukan laporan bulanan dan tidak berdasarkan proposal bantuan yang diterima terkadang tidak tepat sasaran, dan keadaan orang tua murid yang kurang mampu sehingga belum bisa mencukupi kebutuhan peralatan sekolah anaknya dalam buku-buku pelajaran sehingga masih bergantung pada pinjaman buku dari sekolah yang kemudian difotocopy oleh masing-masing siswa.

Untuk meningkatkan kualitas standar pelayanan sarana dan prasarana sekolah terutama tingkat sekolah dasar diperlukan kerjasama yang baik antar aparaturnya pendidikan dalam memberikan pelayanan yang prima dari jajaran dinas pendidikan sampai aparaturnya sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru-guru pengajar, staff TU, komite sekolah sebagai wali murid serta pihak-pihak lain yang ada didalamnya untuk bersama-sama secara partisipatif dalam memberikan saran kepada aparaturnya pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan.

Adanya usaha untuk lebih mengoptimalkan pelayanan teknis melalui mempercepat jalannya pembangunan sarana dan prasarana sekolah meliputi pembangunan Laboratorium Bahasa, Laboratorium IPA, pembangunan perpustakaan yang layak yang digunakan siswa untuk belajar dan menambah wawasan ilmu, pembangunan tempat ibadah, serta rehabilitasi bangunan yang rusak dan Menumbuhkan partisipasi masyarakat/wali murid agar lebih mendukung dan memberikan kepercayaan kepada sekolah dalam mengelola dan menjalankan pembangunan dibidang sarana dan prasarana.

### **Daftar Pustaka**

- Wahab, Abdul.2005.*Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bafadal, Ibrahim., 2003. *Manajemen Perlengkapan Sekolah (Teori dan Aplikasinya)*.,Bumi Aksara, Jakarta.
- Miles, Matthew. B. Dan A. Michel Huberman.2007. *Analisis Data Kualitatif* Jakarta: Universitas Indonesia
- Suryabrata, Sumadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Dunn, William., 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.*, Gajah Mada University press, Yogyakarta.

**Dokumen-dokumen :**

UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 029/U/2001 tentang Standar  
Pelayanan Nasional